

RADIKALISME: PENDEKATAN ANALISA KONSELING RATIONAL-EMOTIF

Dr. H. Ahmad Sarbini¹, M.Ag., Dudy Imanuddin E, M.Ag.², Dede Lukman, M.Ag.³, Herman, M.Ag.⁴

^{1,2,3,4} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ✉ ahamad.sarbini@uinsgd.ac.id.

Abstract

This article is the result of research on radicalism in Indonesia. Radicalism is an extreme act carried out by certain people or groups. Extreme changes in the social, political, cultural and religious spheres. Sometimes it uses violence as a way of moving. In the present context, the radicalism movement has become the concern of several institutions to study it. Because the movement is not only extreme but also very militant. The radicalism movement always uses the potential of human resources to mobilize members, create networks, coordinate activities, mobilize people, create conflict and confrontation. The radicalism movement is very active in fighting for their ideals by developing and intensifying "issues" about politics "counter-discourse" or "counter-domination" of the state and society. In these conditions, radicalism studies are needed as a first step to model responses, whether carried out by the government or community institutions. This article uses a virtual ethnographic methodology. The process is by tracing the digital footprint of religious organizations' views on radicalism. In this case, specifically the views of Nahdatul Ulama, Muhammadiyah and Persis. The analytical approach uses rational-emotive counseling diagnosis. The results of this study are expected to contribute to the parties concerned about the model of prevention of radicalism in the counseling analysis approach.

Keywords: *Radicalism, antecedent event (A), belief (B), emotional consequence (C), dispute resolution (D).*

1. Pendahuluan

Radikalisme adalah sebuah aliran atau faham yang berpegang teguh pada dasar-dasar agama secara ketat melalui penafsiran terhadap kitab suci secara rigid dan literalis. Dalam pandangan Habermas, radikalisme adalah sebagai gerakan keagamaan yang memberikan porsi sangat terbatas terhadap akal pikiran (rasio) ketika memberikan interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks keagamaan. Secara historis, istilah radikalisme berkaitan erat dengan kemunculan gerakan fundamentalisme yang merupakan atribut sekte Protestan yang menganggap Injil bersifat absolute dan sempurna secara literal. Dalam konteks sekte Protestan, mempertanyakan satu kata yang ada dalam Injil dianggap dosa besar dan tak terampuni. Pada perkembangannya, gerakan fundamentalisme selalu muncul dalam setiap agama besar dunia, tidak hanya Kristen dan Islam, juga terdapat pada agama Hindu, Budha, Yahudi dan Konfusianisme. Bahkan menurut Roger Graudy, fundamentalisme merupakan fenomena yang tidak terbatas pada agama, tetapi terdapat juga pada bidang politik, sosial dan budaya. Fundamentalisme adalah suatu pandangan yang

ditegakkan atas keyakinan, baik bersifat agama, politik maupun budaya, yang dianut oleh para pendirinya dengan menanamkan ajaran-ajarannya sehingga pada saatnya paham atau pandangan tersebut menjadi rujukan sosial (Griffin, 1989; Habermas, 2002).

Pada masa orde baru, gerakan fundamenlisme agama mengalami peningkatan intensitasnya menjadi sangat radikal. Pergerakan radikalisme agama ini memiliki pola tersendiri. Pergerakannya lebih bercorak ideologisasi terhadap ajaran-ajaran tertentu dalam pemahaman agama beberapa kelompok tertentu. Ideologisasi menjadi pedoman bagi pergerakan kelompok-kelompok agama tersebut, khususnya Islam yang telah dianggap sebagai visi dan dasar ideologi wawasan. Dari asumsi dasar inilah berkembang dan mulai dipahami secara interpretatif bahwa Islam sebagai ideologi yang populis, egaliter, berorientasi aksi, dan bersemangat militan. Secara historis, benih-benih radikalisme ini mulai digerakan oleh kelompok-kelompok yang terpojokkan secara politik pada masa orde lama sampai masa Orde Baru.

Di era Reformasi, proses pemantapan “radikalisasi” ini semakin menampakkan identitasnya. Dari kajian awal yang pernah dilakukan peneliti, terbukti bahwa kelompok-kelompok muslim yang diasumsikan mengalami pergeseran gerakan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Perkembangan tersebut adalah terbentuknya jaringan yang kuat, solid, dan meluas dari beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini membentuk jaringan struktur yang masif, mulai dari hirarki tingkat nasional sampai tingkat regional yang paling kecil. Dari kelompok-kelompok inilah proses radikalisasi gerakan Islam dilahirkan dan dikokohkan dalam berbagai bentuk tindakan sosial-politik yang dilakukan mereka, seperti konflik ideologi, penentangan, protes, atau perlawanan yang merupakan embrio bagi suatu pergerakan radikalisme.

Penelitian tentang radikalisme ini telah dilakukan oleh Ma’arif Institute pada medio bulan desember 2015 dan dimuat di media nasional Kompas. Hasilnya sungguh sangat mengejutkan. Benih radikalisme di kalangan remaja Indonesia dalam tahap yang mengkhawatirkan. Penelitian ini dilakukan terhadap 98 pelajar Sekolah Menengah Atas yang mengikuti Jambore Maarif Institute. Salah satu poin pertanyaan yang diajukan kepada para pelajar yaitu, “bersediakah Anda melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam?” Hasilnya, 40,82 responden menjawab bersedia, dan 8,16 persen responden menjawab sangat bersedia. Sedangkan responden yang menjawab tidak bersedia 12,24 persen dan kurang bersedia sebanyak 25,51 persen (nasional.kompas.com/read/2016/03/02/08065991/Survei.Maarif.Institute.Benih.Radikalisme).

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh SETARA Institute. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa intoleransi yang diajarkan oleh kelompok Islam garis keras atau radikal adalah titik awal dari terorisme. Terdapat sejumlah irisan kesamaan antara kelompok radikal yang intoleran dengan kelompok teroris, di antaranya adalah dukungan terhadap penerapan syariat Islam, penentangan apa yang mereka pandang maksiat, dan pendirian negara Islam. Kesamaan-kesamaan tersebut memunculkan hipotesis bahwa kelompok Islam radikal memiliki potensi yang cukup besar untuk bertransformasi menjadi kelompok teroris. Hipotesis itu kemudian dibuktikan dalam penelitian kelompok

radikal di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut, seorang anggota Jamaah Islamiyah Joko Jihad menjadi sampel, bagaimana individu intoleran menjadi anggota kelompok teroris. Sedangkan kasus "*Ightiyalat*", kelompok radikal di Klaten, menunjukkan bagaimana kelompok radikal dapat bertransformasi menjadi kelompok teroris. Walaupun dalam penelitian yang dilakukan SETARA Institute ini telah membedakan kelompok Islam radikal, khususnya yang lokal dengan kelompok teroris. Kelompok radikal Islam dalam setiap aksinya tidak pernah merencanakan pembunuhan meskipun mereka menggunakan kekerasan sedangkan teroris sasarannya adalah nyawa. Perbedaan kedua adalah sifat organisasi. Kelompok radikal bersifat terbuka sedangkan teroris adalah jaringan tertutup yang hanya anggota dengan kedudukan tinggi atas yang tahu semuanya.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan radikalisme telah dilakukan oleh Moh. Ziyadul Haq Annajih Annajih, Kartika Lorantika dan Hikmah Ilmiyana. Penelitian ini tentang "Paradigma Konseling Multibudaya dalam Penanggulangan Radikalisme". Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bimbingan dan konseling multibudaya dalam menanggulangi radikalisme di kalangan remaja tidak lepas dari konsep psikologi perkembangan remaja. Pendekatan konseling multibudaya diasumsikan mampu menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat untuk saling menghormati dan menerima satu dengan yang lain. Kaum mayoritas bisa menghormati kaum minoritas. Sebaliknya, kaum minoritas bisa menghormati keberadaan kaum mayoritas. Konsep untuk saling menghargai dan menerima satu dengan yang lain merupakan modal dalam membina kerukunan pada kelompok masyarakat yang plural.

Sebenarnya masih banyak hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik itu oleh individu, kelompok maupun lembaga-lembaga non pemerintahan. Akan tetapi, hasil penelitiannya masih bertumpu pada dampak saja, bersifat parsial, konseptual, tidak mendalam, tidak operasional dan belum bersifat solutif dalam upaya menanggulangi sebaran pemikiran dan gerakan radikalisme. Penelitian-penelitian terdahulu lebih bersifat pada menegaskan definisi dari istilah radikalisme. Kemudian mencoba mencocokkan dan pengelompokan berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Upaya yang lebih jauh, baru sebatas melihat dampak pemikiran dan gerakan radikalisme terhadap yang lain, baik itu remaja, orang tua, maupun masyarakat secara luas.

Studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya menjadi pijakan penulis untuk meneliti tentang radikalisme secara komprehensif, khususnya menurut pandangan sebagian organisasi keagamaan yang sudah populis di masyarakat, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS.

2. Metodologi Penelitian

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mendalam dengan dilengkapi data-data terperinci. Jenis penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya" (Sukardi, 2005: 157). Paradigmanya menggunakan konstruktivisme karena yang akan digali berupa pemahaman-pemahaman yang merefresentasikan sebagian organisasi keagamaan populis di Indonesia. Paradigma konstruktivisme memandang ilmu sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaningful action*

melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan dalam menciptakan, memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Denzin & Lincoln, 2009: 137). Berdasarkan paradigma ini, penulis mengasumsikan bahwa radikalisme merupakan realitas yang dikonstruksi. Dengan demikian konstruktivisme merupakan paradigma yang melihat realitas dari sudut pandang subjektif. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*case research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat (Riyanto, 2002: 24).

Metode penelitian yang digunakan adalah etnografi virtual sebab data yang akan digali berkisar tentang makna dan hakikat dari pemahaman orang-orang yang merefresentasikan organisasi keagamaan populis, yakni Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS yang berkaitan dengan radikalisme. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan mampu memotret konstruksi pemahaman subjek dan objek penelitian tentang radikalisme melalui jejak rekam digital. Metode etnografi virtual melihat bahwa teknologi merupakan kumpulan simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri, sebagai suatu bentuk *metaphorical* yang melibatkan kosep baru terhadap teknologi dan hubungannya dengan kehidupan sosial (Hine, 2000; Howard, 2002; Murthy, 2008).

Dengan metode etnografi virtual, peneliti akan mengidentifikasi dan menganalisa pandangan-pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme para sumber informasi dalam dunia maya. Ward (1999) menilai bahwa keterlibatan manusia dalam dunia maya internet telah memunculkan interaksi. Interaksi yang terjadi melalui internet telah melahirkan artefak kultural sehingga kehidupan yang terjadi pada dunia tersebut dapat diteliti dengan metode etnografi. Murthy (2008) melihat bahwa perkembangan teknologi telah mendorong digitalisasi komunikasi sehingga menumbuhkan ruang-ruang kehidupan sosial dan kultural baru. Kozinets (Kozinets V, 1999) memandang bahwa kehidupan sosial dan kultur yang ada di dunia maya internet merupakan interaksi manusia dalam komunitas yang termediasi oleh jaringan internet. Etnografi virtual tidak berusaha menyikap pandangan atau sikap dari informan. Data yang ada di internet itu dihimpun, dikategorisasi, kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam konteks inilah, data-data yang akan dikumpulkan adalah data-data pemikiran atau pandangan beberapa tokoh NU, Muhammadiyah dan PERSIS yang berkaitan dengan radikalisme dan model penanggulangannya sebagai ekspresi representasi dalam realitas dunia maya internet global.

Selanjutnya, analisisnya menggunakan pendekatan konseling rasional-emosif. Konsep-konsep kunci analisa konseling rasional-emosif dikembangkan oleh Albert Ellis. Ada tiga pilar yang membangun tingkah laku individu, yaitu Antecedent event (A), Belief (B), dan Emotional consequence (C). Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Antecedent event (A) yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Belief (B) yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional (*rational belief* atau *rB*) dan keyakinan yang tidak rasional (*irrational belief* atau *iB*). Keyakinan yang rasional merupakan cara berpikir atau system

keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan kerana itu menjadi produktif. Keyakinan yang tidak rasional merupakan keyakinan atau system berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan kerana itu tidak produktif. Emotional consequence (C) merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event (A). Konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari A tetapi disebabkan oleh beberapa variable antara dalam bentuk keyakinan (B) baik yang rB maupun yang iB. Selain itu, Ellis juga menambahkan D dan E untuk rumus ABC ini. Seorang konselor harus menawarkan konseli agar bisa melawan (dispute; D) keyakinan-keyakinan irasional itu yang telah menyelisih pandangan konseli sehingga melahirkan dampak-dampak negatif (effects; E) psikologis positif dari keyakinan-keyakinan yang rasional (Corey, 1995).

Berkaitan dengan penelitian ini, maka telaah yang akan dilakukan pada level diagnosa Antecedent event (A) adalah mengungkap segenap peristiwa luar yang dialami individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain yang berkaitan dengan kemunculan pemahaman, perilaku dan kelompok radikalisme yang diasumsikan terlibat pada gerakan terorisme dalam pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS. Level diagnosa Belief (B) adalah mengungkap keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa dalam pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan. Level diagnosa Emotional consequence (C) adalah mengungkap akibat atau reaksi individu atau kelompok dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event (A) dalam pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS. Terakhir, level dispute resolution (D) dalam pengembangan model penanggulangan secara persuasif yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan irasional yang menyelisih pandangan masyarakat terhadap gerakan radikalisme dan terorisme.

3. Hasil dan Pembahasan

Pandangan sebagian organisasi keagamaan populis, yang diwakili oleh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS tentang radikalisme dalam pendekatan analisis *antecedent event* (A) dapat dideskripsikan bahwa konflik-konflik yang telah terjadi di Indonesia telah mengguncang fondasi struktur kebangsaan yang telah diletakkan oleh para *founding father* dengan semboyan bhinneka tunggal ika. Fakta empiris memperlihatkan terdapat relasi antara konflik primordial dengan perilaku radikal penggunaan simbol-simbol keagamaan. Hal ini mengalami trend peningkatan untuk kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dengan kata lain, selain sentimen primordial yang bersifat komunal, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena radikalisme yang berujung pada perilaku teror. Kasus paling mutakhir terjadi pada 13 Mei 2018 di Surabaya dan di Sidoarjo (<https://gaya.tempo.co/read/1093852/aksi-teror-kini-juga-melibatkan-anak-simak-cara-mencegahnnya> diakses 9/8/2017).

Dalam merespon kejadian tersebut, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menyampaikan keprihatinan dan mengutuk keras tindak teror yang mengusik rasa aman masyarakat Indonesia. Terlebih parahnya,

dilakukan terhadap umat lain yang sedang beribadah. Ketua PWNU Jawa Timur, Mutawakil Alallah menegaskan: "sungguh itu suatu tindakan keji tidak berperikemanusiaan dan tidak beradab" (<http://www.nu.or.id/post/read/90307/nu-jawa-timur-kutuk-keras-aksi-bom-surabaya> diakses 9/8/2017).

Pada kesempatan lain Rais 'Am PBNU Ma'ruf Amien memaparkan bahwa radikalisme merupakan paham yang lahir dari internal umat Islam sendiri, yang mereduksi makna jihad. Reduksi makna jihad yang dimaksud adalah upaya *qital* atau perang, yang pada dasarnya tidak relevan dengan kondisi bangsa Indonesia. Di sini (Indonesia) jihad dalam arti bukan *qitalan* (perang), tapi *ishlahan* (perbaikan) dalam semua hal," ujar Ma'ruf Amien (Niam, 2017).

Radikalisme dalam kaca mata Abdul Mu'ti merupakan segala perilaku yang bertujuan menghadirkan rasa takut. Lebih jauh, ia memaparkan bahwa perilaku terror apapun bentuknya bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ia sendiri sebagai representasi Muhammadiyah mengatakan bahwa Muhammadiyah menolak dengan tegas perilaku terror tersebut. Secara sederhana, radikalisme merupakan suatu bentuk perilaku atau tindakan yang menimbulkan ketakutan masyarakat demi tujuan tertentu dengan cara yang tidak dibenarkan ajaran Islam. Muhammadiyah menolak tegas aksi-aksi terorisme karena mereka menysasar kepada orang-orang yang tidak berdosa (<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/28/pemahaman-agama-lemah-anak-muda-rentan-pengaruh-radikalisme/>. Diakses 9/8/2017).

Secara historis radikalisme muncul pada abad pertama hijriah, "Radikalisme dan terorisme sudah lama ada. Bahkan terorisnya itu hapal Alquran. Mereka berdalih berdasarkan agama," ucap Said di Gedung Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017 (<https://www.liputan6.com/news/read/2942859/said-aqil-radikalisme-dan-terorisme-bawa-agama-sudah-sejak-lama> (06 Mei 2017, 08:17 WIB) diakses 8/9/2018). Dalam kesempatan yang lain Said menjelaskan "Radikalisme dalam Islam sudah muncul sejak abad pertama" ditandai dengan peristiwa protesnya Dzul Khuasir atas pembagian ghanimah oleh Nabi Muhammad SAW yang dipandang tidak adil. Kejadian tersebut menjadi catatan penting, sebab perilaku Dzul Khuasir kelak diasosiasikan dengan gerakan khawarij. Khawarij sendiri memiliki keterkaitan dengan perilaku radikal sebab jalannya selalu dengan kekerasan.

Mantan Ketua PWNU Jateng KH Bukhori Masruri yang panel bersama Muslih menguraikan, radikalisme dalam Islam pertama adalah munculnya kelompok khowarij (keluar dari barisan) yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang, turunan khowarij ada banyak dan berupa model. Tapi polanya sama, yaitu bersikap fundamentalis. Artinya, kata Bukhori, menganggap semua ajaran Nabi Muhammad, tak peduli perintah wajib maupun sunnah, larangan haram maupun cegahan makruh, dianggap sebagai fundamen. "Radikalisme akan terus ada selama akarnya masih ada. Untuk memberantasnya harus mengetahui akarnya. Yaitu perlakuan terhadap teks Al-Qur'an dan hadis yang sempit dan literal," ujarnya (<http://www.nu.or.id/post/read/35130/asal-mula-radikal-adalah-pemahaman-tekstual> diakses 28/8/2018).

Radikalisme juga lahir karena adanya kesenjangan sosial akibat imbas dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang melahirkan konglomerasi. Ia menilai kebijakan ekonomi pemerintahan kadang memberikan keleluasaan para konglomerat untuk menambah kekayaan. Imbasnya, bisa terjadi konflik sosial. Oleh karenanya, radikalisme dapat timbul dari dua sumber permasalahan. *Pertama*, masalah politik. Politik yang dimaksud adalah ketidakadilan. Disini kepentingan politik bermain untuk memanfaatkan orang-orang yang terpinggirkan direkrut untuk melakukan radikalisme. Para pemain politik itu lalu mencari keuntungan dari radikalisme. *Kedua*, masalah ekonomi. Tidak adanya pemerataan ekonomi tidak jarang membuat orang miskin frustrasi. Lalu mereka bisa melakukan apapun demi uang. Radikalisme agama bisa terlahir dari hasrat politik segelintir elite kelompok masyarakat agama, dan kelompok-kelompok yang mudah frustrasi, bukan hanya dari masyarakat agama itu sendiri."segelintir orang yang apriori melihat persoalan dan menganggap dirinya benar inilah problem yang sering memicu," jelasnya (<https://www.nu.or.id/post/read/689/radikalisme--lahir-dari-ketidakadilan> diakses 28/8/2018). Jika perekonomian Indonesia melemah maka akan semakin memicu para kelompok terorisme untuk melawan pemerintahan."

(<http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/28/pemahaman-agama-lemah-anak-muda-rentan-pengaruh-radikalisme/>. Diakses 9/8/2017)

Begitupun menurut pendapat direktur Wahid Institute Yeni Waid, usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Apalagi, generasi ini melihat adanya ketidakadilan di sekitar mereka. Akibatnya, mereka dengan mudah menerima gagasan-gagasan dan pemikiran radikal yang mereka peroleh dengan mudah melalui tulisan di dunia maya maupun lisan yang disampaikan pemuka agama.

Selain Yeni Wahid, Koordinator Peneliti Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Chaider S Bamualim juga memaparkan, kaum muda muslim zaman sekarang mengalami fenomena yang disebut hibridasi identitas. Fenomena itu adalah identitas keagamaan yang merupakan hasil dinamika dan interaksi sosial politik yang mereka alami dengan lingkungannya. Menurut Chaider, pemuda Muslim masa kini dapat bersikap akomodatif terhadap nilai baru yang diperolehnya. Hibridasi identitas dalam banyak hal memiliki kecenderungan moderat dan toleran dalam sikap dan perilaku bagi kaum muda muslim tetapi justru rentan disusupi pengaruh radikal. Chaider mengatakan, untuk memahami dinamika sosial, politik, dan keagamaan, seringkali merangsang kaum muda mencari pijakan keamanan yang lebih kokoh. Proses pencarian tersebut biasanya membuat sebagian kaum muda muslim mengalami hibridasi identitas yang kompleks. Oleh karena itu, Chaider meminta agar kaum muda tidak cuek dengan gejala di masyarakat. Sebab, kelompok ekstremis bisa dengan mudah mencari celah dan masuk menguasai pemuda yang moderat itu (<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/21433601/pemuda-muslim-moderat-masih-rentan-godaan-radikalisme> diakses 28/8/2018).

Pendapat Chaider dibenarkan oleh survei yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah pada akhir 2017 yang menunjukkan adanya potensi radikalisme di kalangan generasi Z, yaitu generasi yang lahir sejak pertengahan 1990-an sampai pertengahan 2000-an. Temuannya adalah sebesar 37.71 %

memandang bahwa jihad atau khital, alias perang, terutama perang melawan non-Muslim. Selanjutnya 23.35 % setuju bahwa bom bunuh diri itu jihad Islam. Lalu 34.03 % setuju kalau Muslim yang murtad harus dibunuh. Temuan lain, 33,34 % berpendapat perbuatan intoleran terhadap kelompok minoritas tidak masalah. Para generasi Z ini mereka mendapatkan banyak materi Islam salah satunya dari internet dan medsos (<http://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> diakses 28/8/2018).

Kelompok radikal menggunakan internet dan media sosial dengan serius karena menjangkau warganet secara luas. Dari ratusan ribu atau jutaan yang menonton atau membaca informasi yang diunggah, dalam persentase tertentu ada yang terdoktrinasi. Dari situ, tinggal membina, membangun jejaring dan merawatnya untuk memperkuat posisi dan suatu saat dimanfaatkan bagi kepentingan kelompoknya (<http://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> diakses 28/8/2018).

Radikalisme tidaklah muncul dari ruang hampa. Dalam teori sosial, radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain. Dalam pandangan kaum fakta sosial bahwa ada tiga asumsi yang mendasari keseluruhan cara berpikirnya, yaitu terdapat keajegan atau terdapat keteraturan sosial (*social order*), terdapat perubahan sekali waktu dan tidak ada fakta yang berdiri sendiri kecuali ada fakta penyebabnya. Akar radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab, antara lain:

Pertama, adanya tekanan politik penguasa. Di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme. Dalam kasus Orde Baru, negara selalu membabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya radikalisme adalah musuh nomer satu dan dijadikan sebagai *common enemy* melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti Gerakan *New Left*, yang pernah berkembang di Indonesia sekitar tahun 1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun 1990-an melalui Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan terhadap gerakan radikal kiri ini, banyak para tokohnya yang ditangkap, disiksa, bahkan ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Orde Baru juga sangat keras terhadap radikalisme kanan. Di antara yang paling menonjol adalah isu Komando Jihad di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota Komando Jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itu pun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di pertengahan tahun 1990-an.

Hubungan antagonis terjadi di awal Orde Baru sampai awal tahun 1980-an dan hubungan simbiosis terjadi di era tahun 1990-an (Thaba, 1995). Di era reformasi, jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme kanan. Setelah kran-kran kebebasan demokrasi dibuka, tidak serta merta membuat gerakan radikal ini surut, bahkan tumbuh subur, seperti munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Lasykar Jihad, Gerakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Jamaah

Ansharut Tauhid (JAT), Negara Islam Indonesia (NII) dan berbagai agama bercorak lokal adalah sebuah potret merebaknya gerakan-gerakan keagamaan ini (Azra, 1996).

Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Lebih tepat dikatakan hal itu sebagai faktor emosi keagamaannya dan bukan agama (wahyu suci yang absolut), karena gerakan radikalisme selalu mengibarkan bendera dan simbol agama seperti dalih membela agama, jihad, dan mati syahid. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, yakni nisbi dan subjektif. Keterlibatan faktor emosi keagamaan ini nyata ditunjukkan dengan terjadinya kerusuhan massal di awal reformasi, ratusan gereja dan tempat usaha etnis Cina dibakar, dirusak, dan dijarah. Pada bulan Mei 1998 kerusuhan bernuansa SARA menewaskan lebih dari 1000 orang. Kerusuhan Timor Timur, Poso, Ambon, Sambas, dan lainnya adalah sebagian dari daftar panjang kerusuhan yang dilatari oleh konflik agama dan etnik (Budhy Munawar-Rahman, 2010: LVII). Kekerasan yang baru saja terjadi misalnya kekerasan kelompok FPI dengan Ahmadiyah di Cikeusik, kerusuhan di Temanggung, Lombok, dan kerusuhan Syiah dan NU di Madura yang berlatar agama.

Ketiga, faktor kultural ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatarbelakangi munculnya radikalisme. Hal ini wajar karena memang secara kultural, sebagaimana diungkapkan Musa Asy'ari (1992), bahwa di dalam masyarakat selalu diketemukan usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesis terhadap budaya sekularisme. Budaya Barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas negeri-negeri dan budaya Muslim. Peradaban Barat sekarang ini merupakan ekspresi dominan dan universal umat manusia. Barat telah dengan sengaja melakukan proses marjinalisasi seluruh sendi-sendi kehidupan Muslim sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. Barat dengan sekularismenya sudah dianggap sebagai bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan Islam sekaligus dianggap bahaya terbesar dari keberlangsungan moralitas Islam. Hal ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan sehari-hari, seperti semakin masifnya pola konsumsi umat beragama pada produk-produk Barat, misalnya ATM, handphone, internet, dan produk global lainnya (Qodir, 2011).

Gerakan radikal di Indonesia disinyalir Yudi Latif karena mereka tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul dimasyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal. Mereka berasumsi bahwa untuk menunjukkan eksistensi mereka maka mereka harus mengeliminasi eksistensi orang lain. Teroris berani mati karena mereka menganggap perbedaan adalah musuh dan ancaman yang harus dihancurkan. "Teroris berani mati, tetapi tidak berani hidup, mereka adalah musuh kehidupan".

Keempat, faktor ideologis antiwesternisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam,

sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi penegakan syariat Islam. Walaupun motivasi dan gerakan anti-Barat tidak bisa disalahkan dengan alasan keyakinan keagamaan tetapi jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memosisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. Yudi Latif menandakan, munculnya terorisme disebabkan karena tidak berjalannya *sense of conception of justice*. Teroris muncul karena munculnya skeptisisme terhadap demokrasi. Demokrasi dianggap sebagai sistem negara kafir (<http://icrp-online.org/112011/post-804.html>, diakses 9 Maret 2012).

Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustrasi dan kemarahan sebagian umat Islam disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini elit-elit pemerintah di negeri-negeri Muslim belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan (radikalisme) sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat. Hal yang demikian diungkapkan oleh Mahathir Muhammad dalam sambutannya pada acara pertemuan negara-negara OKI di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 1-3 April 2002 (SOLOPOS, 2002: 4). Di negeri ini bisa dilihat tidak tuntasnya penyelesaian masalah korupsi, aset negara yang banyak lari ke luar negeri, pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia, dan disedotnya kekayaan negara oleh konspirator politik.

Keenam, faktor media massa (pers) Barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam. Propaganda-propaganda lewat pers memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis sehingga sebagian “ekstrim” yaitu perilaku radikal sebagai reaksi atas apa yang ditimpakan kepada komunitas Muslim. Lihat misalnya film *Fitna*, penggambaran tentang kiamat (film 2012), dan lainnya.

Secara objektif dapat dipahami bahwa gerakan radikalisme muncul disebabkan beberapa hal, yaitu: karena kuatnya tekanan rezim politik yang berkuasa, di mana kelompok Islam tertentu tidak diberi kebebasan berpendapat; kegagalan-kegagalan ideologi sekuler dalam menegakkan keadilan, moral, dan kesejahteraan rakyat, sehingga melahirkan radikalisme agama yang diyakini sebagai satu-satunya alternatif ideologis bagi umat Islam (Azhar, 2001: 123).

Selanjutnya hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS tentang radikalisme dalam Pendekatan Analisis Analisis *Belief* (B). Tiga hal yang harus diluruskan adalah tentang faham khilafah Islamiyah, jihad, dan pengkafiran,” (<http://www.nu.or.id/post/read/58330/ini-tiga-hal-yang-harus-diluruskan-dari-isis-menurut-waketum-pbnu> diakses 25/8/2019).

Pertama, soal khilafah islamiyah. Menurut As'ad yang akhir tahun lalu meluncurkan buku “al Qaeda: Kajian Sosial Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya”. Al Qaeda maupun ISIS sebagai refresentasi kelompok radikalis menganggap khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya sistem politik Islam, sedang sistem selain itu dianggap kafir. Bedanya, al Qaeda masih dalam bentuk wacana, sedangkan ISIS sudah memproklamirkan khilafah,” tambahnya. Sementara bagi

NU, khilafah Islamiyah bukanlah suatu sistem politik atau model negara, tetapi sebagai konsep kepemimpinan seperti dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 30. Nahdlatul Ulama dan para ulama dari Ormas pendiri lain seperti Muhammadiyah, Sarikat Islam, dan kaum nasionalis lainnya telah menyepakati sistem politik yang didasarkan Pancasila sebagai ijtihad bersama, sehingga tidak memerlukan sistem politik lain.

Kedua, tentang jihad. Kelompok radikalisme mengartikan jihad dalam arti sempit yaitu hanya perang atau kekerasan. Sedang jihad dalam arti persuasif, pendidikan, dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial lain dianggap bukan bagian dari jihad. Pandangan tersebut berbeda secara diametral dengan pandangan mayoritas ulama yang beranggapan bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu.

Jihad dalam artian perang hanyalah sebagai jenis jihad. Bagi ulama NU, jihad tentu saja tidak bermakna sempit qital (perang), tetapi berarti luas termasuk membangun perdamaian dan ketertiban sebagai landasan peradaban dunia.

Ketiga, takfiri atau pengkafiran. Kelompok radikalisme berkeyakinan golongan di luar mereka adalah kafir. Artinya mayoritas umat Islam lainnya adalah kafir. Menurut sebagian mereka, orang kafir tersebut wajib diperangi (dibunuh), kecuali bersedia membayar upeti (jizya). Sementara mayoritas ulama berpendapat sebaliknya. Para ulama menganggap bahwa pengkafiran terhadap sesama muslim berarti menghilangkan pluralitas yang sudah menjadi kodrat manusia.

Secara historis, radikalisme adalah paham yang cenderung untuk memperjuangkan sesuatu secara ekstrem, di mana pelakunya adalah penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner. Mayoritas aliran-aliran radikalisme merupakan gerakan protes politik yang diekspresikan dengan terma keagamaan dengan menggunakan tindakan radikal. Kaum radikalisme memiliki pandangan epistemologis bahwa Islam adalah satu-satunya jalan hidup yang harus ditegakkan tanpa harus mempertimbangkan akibatnya terhadap hak-hak kelompok atau agama lain (Sagiv, 1997: 4).

Di samping itu, gerakan radikalisme dalam Islam juga memiliki karakteristik sebagai berikut. *Pertama*, mereka sering digerakkan oleh motif kebencian yang sangat besar kepada Barat. *Kedua*, mereka menyakini akan kembalinya kejayaan peradaban Islam masa lalu. *Ketiga*, mereka menyakini tujuan perjuangan terbesar itu mengaplikasikan syari'at Islam dalam tatanan negara. *Keempat*, mereka menyakini bahwa Islam itu adalah agama dan negara. *Kelima*, mereka menyakini bahwa masa lalu sebagai penuntun masa depan secara revolusioner (Husein, 2001: 166).

Adapun hasil dan pembahasan tentang pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS tentang Radikalisme dalam Pendekatan Analisis *Emotional Consequence* (C). Dari hasil rekam jejak digital melalui *surface web* di media-media online, sebagian tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan Persis mendeskripsikan tiga kecenderungan sikap emosional yang menjadi indikasi radikalisme. *Pertama*, radikalisme merupakan respons secara reaktif terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang

bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. *Kedua*, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Sikap radikalisme mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. *Ketiga* adalah kuatnya keyakinan kaum radikal terhadap kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang harus diganti dalam gerakan sosial. Keyakinan tentang kebenaran program atau ideologi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.

Oleh karena yang dominan adalah sisi emosional maka penafsiran-penafsiran teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah lebih berpijak pada: 1) Kecenderungan zahiri dalam memahami nash-nash (secara harfiah); 2) Sibuk mempertentangkan hal-hal sampingan seraya melupakan problem-problem pokok; 3) Berlebih-lebihan dalam mengharamkan segala sesuatu; 4) Pemahaman keliru dalam beberapa pengertian; 5) Kedangkalan pikiran dalam memahami Islam dan ketidakjelasan pandangan tentang pokok syari'atnya. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah (Rubaidi, 2007: 63). Uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa konsekuensi dari pemahaman radikalisme bukan hanya berkaitan dengan persoalan nalar dalam menafsirkan teks-teks suci ajaran al-islam. Akan tetapi juga berkonsekuensi pada perilaku emosional yang kadang bertindak secara irrasional.

Terakhir, pandangan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan PERSIS tentang Model Penanggulangan Radikalisme dalam Pendekatan Analisis *Dispute Resolution* (D). Adapun teknikny meliputi: *Pertama*, Teknik *Reinforcement*. Teknik untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis teknik ini dimaksudkan untuk membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irrasional dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif, dan; *Kedua*, Teknik *Social modeling*. Teknik untuk membentuk tingkah laku-tingkah laku baru. Teknik ini dilakukan agar dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara imitasi (meniru), mengobservasi, dan menyesuaikan diri dan menginternalisasikan norma-norma dalam sistem model sosial dengan masalah tertentu yang telah disiapkan sebelumnya (Capuzzi & Gross, 2007; Corey, 2009).

Dalam konteks inilah organisasi Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan Persis merupakan bagian dari alternatif *dispute resolution* dalam menyikapi maraknya gerakan radikalisme di Indonesia. Organisasi-organisasi ini telah menjadi mitra BNPT dalam melakukan upaya-upaya deradikalisasi. Tentu bukanlah tanpa alasan, organisasi-organisasi yang dibentuk masyarakat bersinergi dengan BNPT dalam melakukan program deradikalisasi. Seperti yang dikatakan oleh kepala BNPT, bahwa program deradikalisasi yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selama ini merupakan upaya berkesinambungan yang bergerak multi-disiplin dan lintas sektoral antar

berbagai kementerian, lembaga (K/L) dan elemen masyarakat. Dijelaskan Kepala BNPT, dalam siklus deradikalisasi telah digambarkan bagaimana proses sasaran deradikalisasi menjalani tahapan deradikalisasi hingga berintegrasi kembali ke masyarakat. Dan diharapkan proses reintegrasi tersebut tidak banyak menemui kendala (<https://damailahindonesiaku.com/program-deradikalisasi-perlu-melibatkan-berbagai-pihak.html>). Ketua BNPT Suhardi Alius menyatakan mengalami keterbatasan personel untuk melakukan deradikalisasi terhadap para napi terorisme. Karena itu, BNPT menggandeng sejumlah pihak untuk melakukan deradikalisasi termasuk ormas keagamaan seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya (<https://tirto.id/pbnu-minta-dukungan-penuh-pemerintah-untuk-bantu-deradikalisasi-cLrE>).

Secara konseptual upaya *dispute resolution* dalam bentuk deradikalisasi yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah telah disajikan dalam *role social model* Islam Nusantara dan Gerakan Islam Berkemajuan yang moderat dan toleran. Dalam hal ini telah diakui oleh Tito sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ke-23, saat ini diperlukan adanya ideologi tandingan yang bersifat moderat untuk meredam maraknya penyebaran pemahaman radikalisme di masyarakat. "Terorisme tidak bisa ditangkal hanya dengan menangkap dan menembak pelaku. *Counter ideologi* dilakukan dengan memoderasi narasi radikal mereka," ujar Tito dalam acara diskusi 'Simposium Deradikalisasi' di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2017). Tito menuturkan, peran para ahli agama sangat diperlukan untuk membantu pemerintah memberantas terorisme. Pasalnya, penyebaran paham radikal kerap dilakukan oleh kelompok teroris melalui narasi ideologi dengan mengutip ayat-ayat kitab suci yang multitafsir. Dia mencontohkan konsep Islam Nusantara di kalangan Nahdlatul Ulama merupakan salah satu contoh ideologi tandingan. Jika dilakukan secara

Pada kesempatan yang sama, pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan, program deradikalisasi yang penting dilakukan adalah kontra wacana. Cara tersebut pernah dilakukan oleh pemerintah Spanyol untuk meredam kelompok radikal yang menggunakan ayat-ayat kitab suci. "Ini sama seperti di Indonesia. Wacana yang diturunkan membutuhkan interpretasi dan monolitik. Tapi di sini tidak ada yang melawan. Maka NU dan Muhammadiyah yang paling berpotensi karena umatnya banyak," ujar dia (<https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/17525891/kapolri.islam.nusantara.bisa.menangkal.radikalisme.>).

Gagasan NU tentang Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan gerakan Islam berkemajuan dipandang oleh beberapa pihak sebagai *social model* dan mampu mereinforcement ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irrasional pada pengikut radikalisme dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif. Islam Nusantara, menurut mantan Wakil Ketua Umum PBNU, Slamet Effendi Yusuf menyebutkan dibutuhkan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Islam Nusantara adalah *rahmatan lil alamin*. Islam yang datang bukan untuk menyapu habis yang sudah ada di bumi tetapi untuk menyempurnakan, termasuk adat-istiadat. NU sendiri, lanjutnya, menerima kondisi masyarakat Indonesia yang plural. Untuk itu, segala sesuatu yang eksklusif, misalnya negara berdasarkan agama, tidak akan diterima

oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. NKRI adalah final. Itulah Islam Nusantara, yang memandang segala sesuatu itu tidak secara ekstrem, tegasnya (<https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menangkal-paham-radikal-dengan-rahmat-islam-nusantara-12032015140953.html>).

Ketua PB NU, Said Aqil Siraj (2004: 204) mengatakan bahwa hadirnya Islam Nusantara merupakan upaya penanaman kesadaran historis dan deradikalisasi Islam. Islam Nusantara sendiri merupakan suatu diskursus mengenai Islam yang datang di Nusantara. Dimulai sejak peradaban para wali dan ulama' sepanjang sejarah, mulai dari Samudra Pasai, Malaka, Palembang, Banten, Jawa, Pontianak, Bugis, Ternate, Tidore di Maluku dan Papua. Bagaimana memandang Islam menggunakan perspektif Nusantara sendiri. Bukan perspektif Barat atau Arab yang selama ini selalu bias dalam memahami kenusantaraan. Diskursus ini menjadi penting dan relevan baik dalam konteks geopolitik maupun geokultural dalam percaturan politik global. Terutama dalam wilayah menangkal radikalisasi yang sedang berkembang di kebanyakan negara Islam di Timur tengah.

Islam Nusantara hadir tidak untuk menggeser kemurnian Islam akan tetapi menjadi sebuah penegasan bahwa Islam hadir di Nusantara ini dengan penuh kedamaian dengan mengadaptasi nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah dulu mengakar. Kesadaran historis dikalangan umat muslim Indonesia harus terbangun. Agar otentisitas ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh *salafuna sholih* di Indonesia tetap terjaga. Seiring perkembangan zaman, eksistensi Islam Indonesia terongrong oleh gerakan kelompok puritanisme Islam transnasional. Corak keber-Islaman di Indonesia dinilai telah kehilangan orisinalitas Islam itu sendiri. Terbukanya agama Islam di Indonesia untuk mengakomodasi hasil akulturasi dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

Pemikiran Islam Nusantara menjadi penting untuk didemonstrasikan kepada masyarakat luas. Dengan *spirit rahmatan lil alamin*, Islam Nusantara diharapkan menjadi solusi dalam menangkal radikalisme. Penegasan bahwa Islam adalah agama yang toleran, moderat dan ramah, tidak mengedepankan kekerasan, karena Islam hadir sebagai agama rahmat seluruh alam. Kompromi teks-teks (*nash*) keislaman yang rigid dengan budaya lokal (tradisional) ataupun kemajuan dunia modern beserta globalisasi menemui penjelasan dan pemahamannya yang cerah serta mencerahkan.

Islam Nusantara dengan membawa semangat nilai-nilai Islam yang santun, toleran, cinta damai, menjunjung kemanusiaan, perdamaian, cinta tanah air dengan internalisasi nilai-nilai Islam dan akulturasi kearifan lokal. Menjadikan Islam Nusantara sebagai harapan dalam penyelesaian problematika keumatan pada umumnya, dan radikalisasi Islam pada khususnya.

Gagasan Islam Nusantara membentuk gerakan Islam kultural sebagai lawan dari gerakan radikalisasi Islam yang merupakan gerakan Islam ideologi. Strategi Islam Budaya untuk melawan Islam politik pernah diterapkan oleh Abdurrahman Wahid di pertengahan era-80 lewat gagasan pribumisasi Islam. Bagi Gus Dur, ketika Islam "menjadi politik", ia telah menjadi ideologi, dan ketika menjadi ideologi, Islam akan hanya menjadi alat kepentingan segelintir elite yang menggerakkan suatu massa diam (Arif, 2010: 19).

Kemunculan gerakan radikalisme dalam Islam adalah sebuah keniscayaan, dalam menanggapi pergolakan zaman. Syaiful Arif mengatakan bahwa radikalisme Islam lahir sebagai suatu respons posmodernitas dalam menanggapi modernitas. Oleh karena kehadirannya sebagai bentuk respon posmodernitas, maka akan tetap menemukan lawan pemikiran yang lahir dari kelompok moderat dalam Islam. Termasuk lahirnya Islam Nusantara merupakan lawan pemikiran dari radikalisasi dalam Islam.

Ketum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Khairul Anam Haritsah menilai, konsep Islam Nusantara dapat menjalankan program deradikalisasi dari pemerintah. Pasalnya, Islam Nusantara menonjolkan sisi kebhinekaan dan jauh dari doktrin-doktrin kekerasan. Hal itu diungkapkan Khairul Anam dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema Perspektif Islam Nusantara dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Jakarta, Senin (6/7). Kata Khairul: *"Islam Nusantara itu merangkul bukan memukul, Islam Nusantara itu menasehati bukan menyakiti, dan Islam Nusantara itu mengajak bukan menjelek. IPNU akan mendukung kehidupan berbangsa agenda MPR dengan membumikan Islam Nusantara"*.

Islam Nusantara dapat menjadi kontra-radikalisme, memiliki watak-watak ajaran *ahlusunnah waljama'ah* yang dapat diartikan sebagai "para pengikut tradisi Nabi Muhammad dan ijma' (kesepakatan) ulama". Watak-watak meliputi; watak moderat (*tawassuth*) merupakan ciri *Ahlussunah waljamaah* yang paling menonjol, di samping juga *I'tidal* (bersikap adil), *Tawazun* (bersikap seimbang), dan *Tasamuh* (bersikap toleran), sehingga ia menolak segala bentuk tindakan dan pemikiran yang ekstrim (*tatharruf*) yang dapat melahirkan penyimpangan dan penyelewengan dari ajaran Islam. Dalam pemikiran keagamaan, juga dikembangkan keseimbangan (jalan tengah) antara penggunaan wahyu (*naqliyah*) dan rasio (*'aqliyah*) sehingga dimungkinkan dapat mengakomodasi terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan doktrin-doktrin yang dogmatis (Dhofier, 1994).

Adapun organisasi Persis setelah dilacak jejak digitalnya belum memiliki konsep yang jelas mengenai upaya deradikalisasi di Indonesia. Hasil pelacakan jejak virtual, Persis baru sebatas pendudukan saja. Sebagaimana rilis PP Persis "Mendukung segala upaya pemerintah dalam penanganan sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama dalam memutus mata rantai setiap potensi dan penyebab lahirnya gerakan radikalisme." Selain itu, PP Persis juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang tidak terprovokasi dan ikut membantu aparat dalam mengantisipasi terulangnya teror susulan dengan memberi informasi dini kepada pihak berwajib jika ada gejala-gejala yang mencurigakan (<http://www.sigabah.com/beta/pp-persis-mengutuk-keras-tindakan-terorisme>).

Sementara, Muhammadiyah sebagaimana NU telah memiliki upaya-upaya secara konseptual. Upaya-upaya yang lebih berorientasi pada mengembangkan pola-pola kemitraan strategis dengan pihak manapun tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai gerakan *civil society* yang mandiri. Dalam acara seminar nasional "Moderasi Antitesis Radikalisme dan Deradikalisasi" di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa, Muhammadiyah tidak akan masuk dalam gerakan

deradikalisasi (Republika, 3 April 2016). Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa, Muhammadiyah seratus persen menolak radikalisme dan ekstrimisme seperti terorisme dan tindakan teror, terlebih yang mengatasnamakan agama dan penyalahgunaan makna mengenai konsep Jihad. Mengingat tindakan kontra radikalisme dalam batasan tertentu harus dilakukan dan itu perlu (Suara Muhammadiyah, 3 April 2016). Dengan konsep moderasi tersebut, Dr Haedar Nashir menjelaskan bahwa Muhammadiyah ingin menjelaskan konsep jihad secara menyeluruh sehingga tidak terjadi kesalahan dalam memahami maupun disalahgunakan oleh seseorang maupun sekelompok orang tertentu (Suara Merdeka, 3 Mei 2016). Maka dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha menciptakan rasionalitas publik, kedewasaan publik dan keberanian publik agar bisa menyikapi secara objektif dalam hal radikalisasi dan radikalisme.

Muhammadiyah beranggapan kekerasan tidak harus selalu dihadapi dengan kekerasan pula. Bukan hanya asal eksekusi mati di tempat tetapi harus melalui proses hukum yang adil. Jalannya harus *soft approach* atau *persuasif*. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan bahwa program deradikalisasi agar lebih berorientasi pada substansi bukan hanya *project oriented*. Menurutnya, Muhammadiyah mengatasi dan pencegahan paham radikalisme melalui dua ranah yaitu, baik secara struktural maupun ranah kultural. Secara struktural Muhammadiyah melakukan upaya peneguhan ideologi Islam yang berkemajuan. Hal tersebut dilakukan mulai dari pimpinan Muhammadiyah hingga pada tingkat ranting. Dalam praktiknya, peneguhan ideologi tersebut melalui materi-materi pengajian kaderasi, majlis, ortom, serta amal usaha Muhammadiyah. Kemudian, pada tataran Kultural, Muhammadiyah juga mentransformasikan dalam penyampaian materi-materi di sekolah, pesantren, hingga perguruan tinggi Muhammadiyah (Harifin, 2010).

Berdasarkan Putusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta tentang revitalisasi pendidikan Muhammadiyah BAB III poin ke-6 mengenai Konsep Pendidikan Muhammadiyah menyebutkan bahwa; "memperhatikan dan menjalankan prinsip keseimbangan (moderat) dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Muhammadiyah berusaha mentransformasikan nilai-nilai Islam moderat melalui pendidikan Islam di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Misalnya, menyajikan berbagai nilai positif dalam menumbuhkan kembangkan nilai-nilai perdamaian. Sehingga disajikan pula pengetahuan dalam mencegah dan mengatasi potensi serta aktualisasi konflik maupun tindak kekerasan pada setiap jenjang kelas ataupun semesternya (Nurwanto, 2013). Aspek ajaran Islam yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam Pendidikan Islam juga mengenai ajaran mengenai akhlak. Muhammadiyah menganggap bahwa akhlak mahmudah sebagai aspek penting dalam membangun karakter individu sehingga bisa mencapai hubungan yang baik dengan Tuhannya maupun dalam komunitasnya (Jainuri, 1992).

Upaya deradikalisasi yang dilakukan Muhammadiyah berpijak pada Islam gerakan berkemajuan. Substansinya adalah gerakan. Dengan berdasarkan pesan al-quran, berarti gerakan pencerahan dari Muhammadiyah untuk Indonesia berkemajuan hanya akan lahir manakala Muhammadiyah sendiri terlebih dulu harus cerah dan mencerahkan (<http://www.muhammadiyah.or.id/id>). Bagi

Muhammadiyah, salah satu agenda gerakan pencerahan yang harus terus menerus diikhtiarkan secara lebih masif dan bersifat transformatif ialah mengembangkan kualitas manusia Indonesia agar menjadi insan yang berkemajuan. Yaitu insan atau manusia yang memiliki jiwa, pikiran, sikap, dan tindakan-tindakan yang maju dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama dan kebudayaan yang hidup di tubuh bangsa Indonesia.

Khusus bagi umat Islam tentu saja kemajuan itu didasari, dibingkai, dibimbing, diarahkan, dan diaktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam, yang mengandung nilai-nilai kemajuan dan pencerahan. Islam sebagai agama yang mencerahkan (*din al-tanwir*) dan memajukan peradaban (*din al-hadlarah*) harus melekat menjadi bagian penting dari pandangan hidup setiap muslim baik individual maupun kolektif. Dari pandangan hidup muslim yang mencerahkan dan berkemajuan itulah lahir atau terbentuk kehidupan masyarakat Indonesia yang berkemajuan di segala bidang. Lebih jauh lagi akan lahir atau terwujud peradaban Indonesia yang utama. Manusia Indonesia harus tumbuh menjadi insan yang berkualitas maju seperti gemar membaca, mencari ilmu, cerdas, kritis, kreatif, inovatif, disiplin, mandiri, tanggungjawab, dan sifat-sifat berkemajuan lainnya agar mampu dari mengejar pelbagai ketertinggalan menuju pada kemajuan hidup yang berkeunggulan. Kemajuan yang tercerahkan dimungkinkan mampu menjadi *problem solving* bagi pemikiran-pemikiran yang ekstrem atau radikal, yang saat ini berkembang di Indonesia.

Karakter manusia Indonesia yang berkemajuan tersebut harus disertai dengan nilai-nilai kemajuan (keunggulan) moral-spiritual seperti keterpercayaan, ketulusan, kejujuran, keberanian, ketegasan, ketegaran, kuat dalam memegang prinsip, dan sifat-sifat moral utama lainnya. Dalam konteks kehidupan kolektif bermasyarakat dan berbangsa sifat-sifat maju tersebut juga harus diimbangi atau disertai dengan nilai-nilai sosial yang utama seperti solidaritas, toleransi, empati, harmoni, dan lain-lain. Keunggulan moral-spiritual dan sosial tersebut harus benar-benar autentik, tidak bersifat kulit luar (pesona lahiriah) dan sekadar menjadi jargon seperti selama ini sering ditampilkan, tetapi teraktualisasikan dalam konsistensi kata dan laku. Apalagi sekadar jadi komoditi politik murahan.

Dalam buku "Indonesia Berkemajuan" (2014), Muhammadiyah memandang bahwa sebagai bagian dari strategi kebudayaan, ikhtiar membangun Indonesia berkemajuan menuntut dikembangkannya pendidikan yang mencerahkan. Pendidikan tersebut dalam prosesnya tidak hanya menekankan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi sekaligus sebagai proses aktualisasi diri yang mendorong peserta didik untuk memiliki ilmu pengetahuan tinggi dan berkeadaban mulia. Karenanya, pendidikan nasional yang selama ini berlaku harus direkonstruksi menjadi sistem pendidikan yang mencerahkan, dengan visi terbentuknya manusia pembelajar yang bertaqwa, berakhlak mulia, dan berkemajuan. Sedangka misinya ialah: (1) Mendidik manusia agar memiliki kesadaran ilahiah, jujur, dan berkepribadian mulia; (2) Membentuk manusia berkemajuan yang memiliki jiwa pembaruan, berfikir cerdas, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas; (3) Mengembangkan potensi manusia berjiwa mandiri, beretos kerja keras, wirausaha, dan kompetitif; (4) Membina peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki kecakapan hidup dan

ketrampilan sosial, teknologi, informasi, dan komunikasi; (5) Membimbing peserta didik agar menjadi manusia yang memiliki jiwa, daya-cipta, dan kemampuan mengapresiasi karya seni-budaya; dan (6) Membentuk kader bangsa yang ikhlas, bermoral, peka, peduli, serta bertanggungjawab terhadap kemanusiaan dan lingkungan. Pendidikan nasional yang holistik tersebut melibatkan seluruh elemen bangsa sehingga menjadi gerakan dan strategi kebudayaan nasional yang menyeluruh menuju kemajuan hidup bangsa yang bermartabat (<http://www.muhammadiyah.or.id/id>).

Para pemikir Muhammadiyah bahwa ideologi Islam berkemajuan perspektif Muhammadiyah ini meyakini bahwa agama dapat dijadikan sebagai sumber kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya secara tegas dan bertanggung jawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi serta hal-hal yang dapat membawa pada kemajuan hidup. Nilai-nilai agama juga dapat mengembangkan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang adil tanpa diskriminasi.

Bagi Muhammadiyah, secara epistemologi Islam yang dipeluk oleh mayoritas orang Indonesia ini merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kebenaran karena di dalamnya mengandung ajaran yang hakiki atau pasti dan sesuai dengan kondisi jaman. Itulah kenapa menurut Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengandung unsur kemajuan (din al-hadlarah) yang berwatak progresif dan sesuai dengan alam pikiran masyarakat modern. Karenanya Islam dapat menjadi sumber nilai yang penting dan utama bagi usaha-usaha membangun kehidupan kebangsaan menuju kemajuan (Nashir, 2006: 110).

Dalam konteks inilah Muhammadiyah berbeda dengan yang lainnya dalam melakukan deradikalisasi. Solusi Muhammadiyah untuk mengurangi tensi radikalisme adalah menyentuh akar masalah radikalisme dan terorisme dan gerakan moderasi adalah jawabannya. Yakni, penanganan hanya pada kelompok atau wilayah yang diasumsikan sebagai pelaku dan atau area radikalisme. Dengan pendekatan *blocking area*, menurut Muhammadiyah, radikalisme dapat diselesaikan secara bijaksana dan mengurangi efek lahirnya radikalisme baru. Nilai-nilai Islam yang damai dan universal dapat dijadikan sebagai *cohesive force* (kekuatan pemersatu) untuk menangani radikalisme (<https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/07/o594sm24-muhammadiyah-deradikalisasi-dan-gerakan-ekonomi>).

Gerakan moderasi merupakan gerakan pemersatu yang mengidealisasikan kerukunan, kebersamaan, dan kegotong-royongan sesama warga di Tanah Air. Gerakan ini mengurangi tensi saling curiga yang memojokkan satu kelompok tertentu. Gerakan moderasi adalah gerakan merangkul tanpa memukul. Dalam bidang ekonomi, gerakan moderasi adalah program memberi ruang partisipasi dan aksesibilitas warga negara ke sumber daya ekonomi yang didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua. Untuk mengurangi tensi radikalisme, kekecewaan pelaku radikalisme harus dikurangi. Dalam konteks gerakan ekonomi, kekecewaan bisa diminimalisasi tentu melalui gerakan mengurangi ketimpangan ekonomi dan gerakan merangkul melalui "aliansi

ekonomi". Maka, ketimpangan ekonomi sebagai biang radikalisme, terjadi tidak sekadar karena rakusnya kekuatan pasar, tapi lebih dipicu keputusan politik.

Berdasarkan uraian diatas, maka gagasan Muhammadiyah yang berhubungan dengan Islam berkemajuan diasumsikan mampu menjadi alternatif *dispute resolution* untuk menanggulangi kemunculan-kemunculan radikalisme di Indonesia.

4. Kesimpulan

Penelitian tentang Radikalisme Pendekatan analisa Konseling Rationla-Emotif, dalam analisisnya menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hadirnya paham Islam radikal di Indonesia tidak lepas dari faktor sejarah masa silam. Embrio gerakan ini sudah ada semenjak masa orde baru, namun baru dapat muncul di permukaan berkat reformasi yang memberikan ruang untuk hadir dan berkembangnya ideologi transnasional. Gerakan Islam ini merupakan kategori Islam Politik dengan misi jihadi dan penegakan syaria'at Islam di bumi nusantara. Dengan corak inklusif gerakan Islam radikal sulit untuk berdialektika dengan peradaban dan kebudayaan lokal. Panji puritanisme menjadi slogan dan misi wajib untuk mengembalikan Islam sesuai ajaran Al-Qur'an dan Al-hadist.
- b. Dari *analisa antecedent event*, menurut Muhammadiyah, NU dan Persis dari jejak digital yang terlacak bahwa akar radikalisme dapat ditilik dari beberapa penyebab, antara lain: *pertama*, adanya tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya; *Kedua*, faktor emosi keagamaan; *Ketiga*, faktor kultural; *Keempat*, faktor ideologis anti westernisme; *Kelima*, faktor kebijakan pemerintah; *keenam*, faktor media massa (pers) barat yang selalu memojokkan umat Islam juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam.
- c. Dari sisi *analisa belief* menurut Muhammadiyah, NU dan Persis dari jejak digital yang terlacak, bahwa: *Pertama*, lahirnya keyakinan yang diiringi dengan mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat; *Kedua*, keyakinan para radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samhah (ringan) dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer; *Ketiga*, kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama; *Keempat*, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara dan emosional dalam berdakwah. Ciri-ciri dakwah seperti ini sangat bertolakbelakang dengan kesantunan dan kelembutan dakwah Nabi; *Kelima*, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya; *Keenam*, mudah mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat.
- d. Dari sisi analisa *dispute resolution* menurut Muhammadiyah, NU dan Persis dari jejak digital yang terlacak, bahwa: Secara konseptual upaya *dispute* dalam bentuk deradikalisasi yang dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah telah disajikan dalam *role sosial model* Islam Nusantara dan Gerakan Islam Berkemajuan yang moderat dan toleran. Sedangkan

Persis belum memiliki *role social model*. Gagasan NU tentang Islam Nusantara dan Muhammadiyah dengan gerakan Islam berkembang dipandang oleh beberapa pihak sebagai *social model* dan mampu mereinforcement ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis dengan membongkar sistem nilai dan keyakinan yang irrasional pada pengikut radikalisme dan menggantinya dengan sistem nilai yang positif yang berpijak pada prinsip-prinsip tawasut (moderat), tawazun (seimbang-equal), adalah (keadilan), tasamuh (toleran), dan muzyarokah (serikat-persatuan). Sedangkan Muhammadiyah dengan Islam berkembang menawarkan nilai-nilai agama sebagai pencerah sebagai sumber kemajuan. Didalamnya memuat nilai-nilai agama yang dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya secara tegas dan bertanggung jawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi serta hal-hal yang dapat membawa pada kemajuan hidup.

5. Saran

Tulisan ini bukanlah sebuah penelitian yang mampu mengungkap secara utuh seluruh aktivitas diskursus yang terjadi dikalangan pemikir Muhammadiyah, NU dan Persis. Akan tetapi, diharapkan bisa menjadi pengantar dan landasan awal untuk pembacaan yang lebih kritis tentang radikalisme. Oleh karena itu, terlepas dari pelbagai kekurangan yang ada dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran dari peneliti, terutama untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hal sama, di antaranya:

- a. Kajian radikalisme dan model penanggulangannya adalah kajian yang luas. Terdapat banyak ruang untuk melakukan eksplorasi dari pelbagai perspektif dan pendekatan. Karena itu, semakin banyak dan beragam penelitian yang dilakukan, maka semakin kaya pula khazanah kajian radikalisme dan model penanggulangannya yang bisa dijadikan referensi teoritis dan praktis.
- b. Pendekatan analisis konseling rational-emotif dan metode virtual digital walaupun sedikit terlalu berani digunakan dalam penelitian ini tetapi bisa digunakan sebagai alternatif yang cukup mampu memberikan kebebasan bagi peneliti untuk memahami suatu persoalan dari berbagai sudut pandang yang lebih luas. Karena itu juga, pendekatan analisa konseling rational-emotif dan metode virtual viryual bisa digunakan untuk penelitian lain guna mendapatkan informasi-informasi penting dari suatu fenomena atau realitas yang banyak terjadi di masyarakat disaat dalam prosesnya mengalami hambatan menemui para informan kunci secara langsung tatap muka.

Akhirnya, penulis berterimakasih kepada kemenag RI melalui LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian mengenai radikalisme perspektif konseling rational-emotif (studi etnografi terhadap pandangan organisasi keagamaan). Begitupun terimakasih kepada tim prosiding ***International Conference on Islamic Guidance and Counseling*** (ICIGC) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu menerbitkan.

Daftar Pustaka

- A.Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007..
- Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Achamd Mukafi Niam, *NU Membimbing Umat; Rais Aam PBNU Jelaskan Sebab Indonesia Jadi Gaduh*, Jakarta: NU Online, 2017.
- Adian Husein, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Said Aqil Siroj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*. Jakarta: LTN NU, 2014.
- Syaiful Arif, *Deradikalisasi Islam paradigma dan strategi Islam kultural*. Koekosan: Depok 2010.
- Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalis, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Capuzzi, D. & Gross, D.R.. *Counseling and Psychotherapy: Theories and Interventions*. Upper Saddle River: New Jersey, 2007.
- Gerald Corey, *Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy*. Belmont, CA: Brooks/Cole, 2009.
- _____, *Teori dan praktek konseling dan psikoterapi*, Bandung :PT Eresco, 1995.
- David Ray Griffin, *God and Religion in the Modern World*, Albany: State University of New York Press, 1989.
- Jurgen Habermas, *Religion and Rationality*, Massachusetts: The MIT Press, 2002.
- David Sagiv, *Islam Otentisitas Liberalisme*, Yogyakarta: Lkis, 1997.
- Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Malang: UPT Penebitan UMM, 2006.
- Hine, C., *Virtual Ethnography*. Howard, P. N. (2002). *Network Ethnography and the Hypermedia Organization*: New Media, New Organizations, 2000.
- Murthy, D, *Digital Ethnography: An Examination of the Use of New Technologies for Social Research*. *Sociology*, 42(5), 837-855; <http://doi.org/http://dx.doi.org>, 2008.
- Jainuri, Achmad, *"The Muhammadiyah Movement In Twentieth-Century Indonesia : A Socio-Religious Study"*, Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1992.
- Muhammad Azhar, *Fiqh Peradaban*, Yogyakarta: Ittaga Press, 2001.
- Mukhlisin, *Bahaya Radikalisme*, <http://icrp-online.org/112011/post-804.html>, diakses 9 Maret 2012.
- Musa Asy'arie. Q. *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: LESFI, 1992.
- Nasional.kompas.com/read/2016/03/02/08065991/Survei.Maarif.Institute.Benih.Radikalisme.
- Norman K Denzin, & Yvonna S Lincoln. *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Nurwanto (et.al). *"Nilai-Nilai Perdamaian dalam Buku Teks Pendidikan Agama Isla (Akhlaq di Sekolah Muhammadiyah)"*, AFKARUNA: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 11. No. 1 Juni 2013

- Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling Tersedia Online di Vol. 1, No. 1, 2017. ISSN 2579-9908.
- Republika, 3 April 2016
- Said Aqil Siradj. *Sejarah Radikalisme..* Video Youtube. Menit 17.35 (7 Oktober 2017) <https://www.youtube.com/watch?v=0xbg4zQSuo0>
- Suara Merdeka, 3 Mei 2016
- Suara Muhammadiyah, 3 April 2016
- Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005).
- Ward, K. J, *Cyber-ethnography and the emergence of the virtually new community*, Journal of Information Technology, 14(1),1999.
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2002.
- Zamakhsyari Dhofier, *Tradi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES, 1994..
- Zuhdi, Muhammad Harifin, "*Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadits*", RELIGIA., Vol 13, No. 1, April 2010.
- Zuly Qodir, *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di RuangPublik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sumber internet:

- <http://www.muhammadiyah.or.id/id>
- <http://www.nu.or.id/post/read/35130/asal-mula-radikal-adalah-pemahaman-tekstual> diakses 28/8/2018
- <http://www.nu.or.id/post/read/58330/ini-tiga-hal-yang-harus-diluruskan-dari-isis-menurut-waketum-pbnu> diakses 25/8/2019
- <http://www.nu.or.id/post/read/90307/nu-jawa-timur-kutuk-keras-aksi-bom-surabaya> diakses 9/8/2017
- <http://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> diakses 28/8/2018
- <http://www.nu.or.id/post/read/90645/radikalisme-yang-menyebar-secara-senyap-pada-remaja-dan-pemuda> diakses 28/8/2018
- <http://www.sigabah.com/beta/pp-persis-mengutuk-keras-tindakan-terorisme>
- <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/28/pemahaman-agama-lemah-anak-muda-rentan-pengaruh-radikalisme/>. Diakses 9/8/2017
- <http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/07/28/pemahaman-agama-lemah-anak-muda-rentan-pengaruh-radikalisme/>. Diakses 9/8/2017
- <https://damailahindonesiaku.com/program-deradikalisasi-perlu-melibatkan-berbagai-pihak.html>
- <https://gaya.tempo.co/read/1093852/aksi-teror-kini-juga-melibatkan-anak-simak-cara-mencegahnya> diakses 9/8/2017.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/17525891/kapolri.islam.nusantara.bisa.menangkal.radikalisme>.
- <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/menangkal-paham-radikal-dengan-rahmat-islam-nusantara-12032015140953.html>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/23/21433601/pemuda-muslim-moderat-masih-rentan-godaan-radikalisme> diakses 28/8/2018

<https://republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/04/07/o594sm24-muhammadiyah-deradikalisasi-dan-gerakan-ekonomi>

<https://tirto.id/pbnu-minta-dukungan-penuh-pemerintah-untuk-bantu-deradikalisasi-cLrE>

<https://www.liputan6.com/news/read/2942859/said-aqil-radikalisme-dan-terorisme-bawa-agama-sudah-sejak-lama> (06 Mei 2017, 08:17 WIB)
diakses 8/9/2018

<https://www.nu.or.id/post/read/689/radikalisme--lahir-dari-ketidakadilan>
diakses 28/8/2018.